

Model Penta Helix Dalam Pengembangan Wisata Halal di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh

Syaripuddin

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Email: syaripuddinsyarip6569@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyse the synergy among stakeholders in the development of halal tourism in Aceh Province, with a focus on tourist attractions in Takengon, Central Aceh Regency. Using a qualitative approach with a phenomenological paradigm, this study explores the thinking of key actors within the framework of the Penta helix model, which involves academics, the business sector, the community, the media, and the government. The findings reveal low synergy among stakeholders, dysfunctional coordination within the business ecosystem, and weak synergy among stakeholders, caused by a lack of collective commitment and insufficient cross-sectoral coordination. Theoretically, the success of business sector development is greatly influenced by shared vision, collective commitment, and synergistic coordination. The contribution of this study is to provide policy recommendations for local governments in formulating support measures for enacting regulations on halal tourism, implementing halal certification for businesses, maintaining a sustainable tourism ecosystem and environment, optimising business licensing management, and upholding Islamic law and local wisdom, as well as the need for creativity among tourism business operators.

Key Words: Pentahelix, Development, Halal Tourism

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan wisata halal di Provinsi Aceh, dengan fokus pada objek wisata di Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berparadigma fenomenologis, kajian ini mendalami konstruksi pemikiran para aktor kunci dalam kerangka Model Penta helix yang melibatkan unsur (akademisi, sektor bisnis, komunitas, media, dan pemerintah). Hasil temuan menggambarkan rendahnya sinergi antar pemangku kepentingan adanya disfungsi koordinasi dalam ekosistem usaha dan sinergi antar pemangku kepentingan, yang disebabkan oleh lemahnya komitmen kolektif, serta minimnya koordinasi lintas sektor. Secara teori, keberhasilan dalam pengembangan sektor usaha sangat dipengaruhi oleh adanya kesamaan visi, komitmen bersama, koordinasi yang sinergis. Kontribusi dari studi ini pemberian rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan bentuk dukungan dalam membuat qanun tentang wisata halal, mengimplementasikan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, menjaga ekosistem wisata dan lingkungan yang asri, optimalisasi tata kelola perizinan usaha, serta menjaga syariat Islam dan kearifan lokal dan perlunya kreativitas para pelaku usaha wisata.

Kata Kunci: Pentahelix, Pengembangan, Wisata Halal

PENDAHULUAN

Pariwisata halal merupakan sektor yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan Muslim di seluruh dunia. Menurut data Global Muslim Travel Index (GMTI), permintaan terhadap destinasi wisata yang memenuhi prinsip syariah terus mengalami kenaikan, menciptakan peluang besar bagi Negara-Negara untuk mengembangkan wisata halal. Dalam laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2024 Indonesia berhasil kembali memperoleh peringkat pertama sebagai destinasi wisata ramah muslim terbaik di dunia, mengalahkan 145 destinasi lainnya.¹. Di Indonesia ada beberapa provinsi yang telah menerapkan wisata halal seperti ada di bawah ini :

Tabel 1. Daftar Provinsi dengan Wisata Halal

5 Besar wisata halal terbaik tujuan	Wisata halal Terkemuka Tujuan
1. Lombok	6. Jawa barat
2. Aceh	7. Yogyakarta
3. Riau dan pulauain riau	8. Jawa Tengah
4. DKI Jakarta	9. Malang-jawa timur
5. Sumatera Barat	10. Sulawesi Selatan

Source: *Crescent Rating-Mastercard*

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa Aceh menempati posisi 2 sebagai daerah destinasi wisata halal terbaik di Indonesia. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2024 bukan tanpa alasan karena didorong oleh berbagai kegiatan diantaranya pekan kebudayaan Aceh (PKA) dan Pekan Olahraga Nasional (PON) dimana Aceh sebagai tuan rumah. Akan tetapi paktor lain yang paling besar pengaruhnya terhadap kunjungan wisatawan ke Aceh adalah karena faktor keindahan alamnya, kenyamanan, dan didukung oleh syariat Islam yang menjadi pembeda dengan provinsi yang lain yang ada di Indonesia.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh pada tahun 2024 mencapai angka yang signifikan yaitu 12,9 juta wisatawan, meningkat dari 8,9 juta pada tahun 2023 dan 6,9 juta pada tahun 2022. Jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh terus menunjukkan peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Jumlah Pengunjung Wisatawan di Aceh 2019-2024

Tahun	Jumlah Wisatawan di Aceh
2019	34.461

¹ Kemenparekraf/Baparekraf RI, *No TitleIndonesia-Raih-Predikat-Top-Muslim-Friendly-Destination-of-the-Year-2024-Dalam-Global-Muslim-Travel-Index* (indonesia, 2024).

Pengembangan Wisata Halal

2020	10.402
2021	0
2022	6,9000
2023	8,9.000
2024	12,9.000

Sumber: Pemerintah Aceh

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu daerah yang berada di provinsi Aceh yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata halal. Hal ini dapat kita buktikan dengan kelebihan yang diberikan oleh sang pencipta yaitu Allah SWT yaitu keindahan alamnya yang tidak dimiliki oleh daerah lain yang ada di Aceh seperti Danau Lut Tawar yang dikelilingi oleh pegunungan lauser, iklim cuaca yang dingin, kopi Gayo yang telah menjadi handalan Masyarakat Aceh Tengah serta di dukung oleh kuliner khas Masyarakat Gayo juga menjadi daya Tarik wisatawan yang berkunjung.

Selain itu daya tarik lain minat wisatawan berkunjung karena adanya festival tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yaitu pacuan kuda tradisional, selain itu adanya kegiatan festival perahu lake lut tawar, festival produk unggulan kopi, Gayo fafting mountain festival, pemilihan win Ipak Aceh Tengah, lomba video promosi pariwisata, festival pameran ekonomi kreatif, dan ecotourism and promotion pesona Aceh Tengah.

Menurut data BPS Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Aceh Tengah diklaim mencapai 1.500 hingga 3.000 pengunjung perhari kunjungan wisatawan terbanyak sebelumnya dipegang oleh sabang dan Banda Aceh. Saat ini Aceh Tengah dikenal tujuan wisata penempati urutan pertama yang ada di Aceh ². Namun, potensi besar ini masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal mengintegrasikan seluruh potensi tersebut dalam satu ekosistem yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Permasalahan klasik seperti belum terbangunnya kolaborasi yang efektif antar sektor, keterbatasan infrastruktur pendukung, minimnya strategi promosi dan branding menjadi penghambat utama. Untuk itu, dibutuhkan sebuah pendekatan strategis dan sistematis melalui pengembangan model pentahelix yang mampu berkolaborasi antar sektor guna mewujudkan wisata halal dan mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) membuka lapangan pekerjaan baru guna meningkatkan pendapan Masyarakat lokal.

Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata halal perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, komunitas dan media termasuk

² Mahya Agustiansyah, "Kunjungan Pariwisata Di Aceh Tengah Diklaim Meningkat."

dalam elemen Penta Helix ³. Disisi lain Temuan menunjukkan bahwa kesadaran halal memiliki dampak signifikan terhadap citra destinasi. Promosi kualitas layanan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap citra destinasi. Kesadaran halal dan kualitas layanan tidak berdampak signifikan terhadap keputusan pengunjung. Citra promosi dan destinasi memiliki dampak signifikan terhadap keputusan pengunjung (⁴).

Upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait sinergisitas dalam penerapan smart tourism di Dieng, Kabupaten Wonosobo antara lain adalah dengan mengoptimalkan penggunaan jaringan internet untuk mempromosikan mempromosikan kawasan wisata Dieng. Selain itu, dinas sebagai regulator juga berusaha untuk membuat regulasi dan sosialisasi dalam penerapan smart tourism melalui digitalisasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Faktor kunci kunci dalam keberhasilan implementasi smart tourism di Dieng Wonosobo, antara lain kesatuan visi, komitmen Bersama komitmen bersama, dan koordinasi antar pemangku kepentingan (⁵).

Senada dengan itu, implementasi kebijakan kolaborasi pentahelix dalam mengembangkan pariwisata halal di dua daerah tersebut terdapat variasi dan keragaman implementasi kolaborasi pentahelix pariwisata halal. Masing-masing daerah memiliki keunggulan yang ditopang oleh kelembagaan multi-sektor dan multi-stakeholders yang saling melengkapi. Pengembangan pariwisata halal Malang dan Banyuwangi juga masih menghadapi berbagai hambatan, terutama belum adanya regulasi sebagai payung hukum pengembangan. Tetapi kedua daerah tersebut berupaya memastikan sekaligus melakukan akselerasi bahwa pengembangan pariwisata halal tetap selaras dengan kearifan lokal. Selain itu kajian ini juga berkontribusi untuk dijadikan role model dalam pengembangan pariwisata halal berkelanjutan di daerah ⁶.

Disisi lain kebijakan regulasi pariwisata dan jaminan produk pangan halal di Aceh belum disinergikan dengan model pentahelix dalam menentukan kebijakan teknis mengenai pengelolaan pariwisata dan jaminan produk pangan halal. Hal ini dapat mengakibatkan terabaikannya perlindungan terhadap hak-hak dasar konsumen, rendahnya kualitas dan

³ Sri Umiyati and M. Husni Tamrin, "Penta Helix Synergy in Halal Tourism Development" 518, no. ICoSIHESS 2020 (2021): 75–81.

⁴ Sunarmo et al., "Effects of Halal Awareness, Service Quality and Promotion on Visitor Decisions Through Destination Imagery as a Mediator," *Indonesian Journal of Halal Research* 6, no. 1 (2024): 13–25.

⁵ Herlan Suherlan, Nurdin Hidayah, and Wientor Rah Mada, "The Synergy Of Penta-Helix Stakeholders In The Development Of Smart Destination In Dieng Tourism Area, Central Java - Indonesia," no. August (2019).

⁶ Lukman Santoso and Yutisa Tri Cahyani, "Pentahelix's Collaboration In The Development of Halal Tourism For Sustainable Regional Economic Development," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2022): 222–237.

keragaman daya tarik wisata, serta terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan aksesibilitas dan fasilitas pariwisata untuk menjangkau pasar potensial. Pada sisi lain, Aceh sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam dan memiliki karakteristik keagamaan yang kuat, maka peran ulama dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pangan halal untuk mendukung pengembangan pariwisata Islami. Selain itu kajian ini juga berkontribusi untuk dijadikan role model dalam pengembangan pariwisata halal berkelanjutan di daerah ⁷.

Oleh karena itu, diperlukan studi yang komprehensif untuk mendapatkan Gambaran mengenai strategi pengembangan wisata halal dengan mengkolaborasi model pentahelix. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sinergi pentahelix dalam meningkatkan potensi wisata halal di Aceh Tengah. Hasil penelitian ini memberikan strategi Solusi dalam kolaborasi model penta helix dalam mengembangkan wisata halal, sehingga dapat mendukung perekonomian daerah dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Artikel ini disusun dalam lima bagian yang berbeda, dimulai dengan pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang wisata halal dan tantangan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan wisata halal. Tinjauan literatur mengeksplorasi penelitian-penelitian yang telah ada mengenai peran pentahelix dalam pengembangan wisata halal, serta mencari celah atau kesenjangannya. Bagian metodologi menjelaskan pendekatan kualitatif yang digunakan dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Bagian hasil dan diskusi membahas temuan-temuan para pemangku kepentingan (pentahelix) dalam pengembangan wisata halal. Kesimpulan merangkum kontribusi studi dan implementasinya untuk wisata halal serta, mengakui keterbatasan penelitian, dan mengusulkan jalan untuk upaya penelitian di selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis induktif. Penelitian ini melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, dan pendeskripsian data dan informasi yang ada. Data untuk penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis: data primer dan data sekunder. Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli melalui wawancara, kuesioner, dan observasi langsung (⁸). Di sisi lain, data sekunder terdiri dari informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya seperti buku, makalah, dan jurnal yang relevan yang

⁷ S W Rahayu and S Abbas, "A Synergy of Halal Tourism Regulations and Tourism Rights Protection in Aceh: Pentahelix Model," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan ...*, no. November (2024).

⁸ M. Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia .

berkaitan dengan topik penelitian ⁹. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen ¹⁰.

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif, eksplanatori, dan analitis untuk mencapai tujuan penelitian). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah, pemangku kepentingan akademis, dinas pariwisata, sebagai pemerintah, komunitas pengiat pariwisata, dan media sebagai promosi wisata wisata halal. Penelitian berlangsung dari tanggal 4 Oktober hingga 29 Oktober 2024. Informan dalam penelitian ini mencakup para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan wisat halal dalam kerangka kerja Penta Helix, termasuk akademisi, pemerintah, komunitas, dan media.

1. Akademisi: Dalam model Penta Helix, akademisi berperan sebagai konseptor. Akademisi menyediakan pengetahuan berdasarkan konsep dan teori yang relevan untuk pengembangan wisata halal, termasuk keterampilan sumber daya manusia.
2. Pemerintah: Pemerintah berperan sebagai regulator, yang bertanggung jawab untuk mengendalikan regulasi pengembangan wisata halal. Pemerintah berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memaksimalkan pengembangan potensi wisata halal.
3. Komunitas: Komunitas berperan sebagai akselerator, yang terdiri dari individu-individu yang memiliki visi dan misi yang sama dalam pengembangan wisata halal. Komunitas berperan sebagai perantara antara pemangku kepentingan dan pengembang wisata halal, memberikan pendampingan dan memfasilitasi.
4. Media: Dalam model Penta Helix, media berperan sebagai media promosi tentang objek destinasi wisata halal. Era digital saat ini dapat berkontribusi pada pengembangan wisata halal di Aceh Tengah.

Peneliti memilih sampel dari individu yang terlibat langsung dalam pengembangan wisata halal yang ada di Aceh Tengah, dengan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria. Sampel yang dipilih mewakili komponen Penta Helix, yaitu akademisi, pemerintah, komunitas, bisnis dan media, karena dianggap paling mengetahui tentang isu yang sedang terjadi ¹¹.

Tabel 3. Daftar Informan

NO	KETERANGAN	NAMA	POSISI
1	Pemerintah	Fadli	Pegawai Dinas Pariwisata Aceh Tengah

⁹ Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, 2007.

¹⁰ R. Sekaran, U., & Bougie, *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (Fifth Ed.)*, 2009.

¹¹ R Ritchie, J., Lewis, J., Nicholls, C. M., & Ormston, "Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers: Sage." (2013).

2	Bisnis	Laini Hen	Pemilik Homestay Pemilik homestay Tenda biru dan Café Tenda Biru
3	Akademis	Fahrul Riza	Dosen IAIN Takengon
4	Komunitas	Gania	Peserta
5	Media	RM	Pengiat wisata

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa pemangku kepentingan yang mewakili kerangka kerja pentahelix, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan berikut ini :

Pemerintah

Dalam penelitian ini, pemerintah diwakili oleh 2 orang : bapak Fadli dan ibu laini diana yang menjabat sebagai pegawai pada dinas pariwisata Aceh Tengah, Pada penelitian ini, pemerintah diwakili oleh : Bapak Fadli dan Ibu Laini Diana Dinas pariwisata Aceh Tengah.

a. Persepsi

Bapak Fadli mengungkapkan bahwa dalam pengembangan Pariwisata halal bukan semata-mata berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga merupakan bentuk pelayanan pariwisata yang ramah terhadap semua wisatawan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kebersihan, keamanan, kenyamanan, serta kepatuhan terhadap norma-norma syariah. Dalam hal ini, pariwisata halal di Aceh Tengah harus menyajikan makanan dan minuman halal dan taiban, sersediannya fasilitas ibadah seperti mushalla yang bersih, toilet yang nyaman, lingkungan wisata yang bersih dan tertib, perkembangan daya saing destinasi yang sesuai dengan pedoman wisata halal.

b. Peran dan Upaya

Pemerintah daerah dalam pengembangan wisata halal di Aceh Tengah belum adanya regulasi/qanun yang mengatur tentang wisata halal hal in diperlukan untuk pedoman bagi pelaku usaha dalam mengimplementasikan wisata halal, serta belum maksimalnya infrastruktur yang ada guna untuk memudahkan wisatawan yang berkunjung. Selain itu objek wisata hotel dan homestay dapat menjadi tempat kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat. Disisi lain menurut Ibu Laini tempat wisata dan homestay tidak hanya sebagai tempat rekreasi akan tetapi dipungsikan sebagai tempat anak-anak menghafal Alqur'an, (*mukayyam*) yang

diselenggarakan oleh sekolah yang ditempatkan di tempat objek wisata dan homestay. Upaya pemerintah dari wisata halal yang ada Aceh Tengah, dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan juga akan berdampak kepada pendapatan asli daerah (PAD).

c. Faktor pendukung dan penghambat

Yang menjadi faktor pendukung dalam pengembangan wisata halal karena keindahan alamnya yang mempesona dan didukung oleh hotel dan homestay yang berbasis syariah. Selain itu tersediannya tempat-tempat kuliner yang mudah terjangkau di sekitaran destinasi wisata yang menawarkan makanan khas daerah tersebut. Disisi lain yang menjadi penghambat disebagian objek wisata terlalu mahal tiket untuk masuk menuju objek wisata dan harus membayar lagi tempat-tempat untuk berteduh yang telah disediakan oleh pengelola, selain itu belum tersedianya kuliner yang memadai di tempat objek wisata.

d. Sinergi antar pemangku kepentingan

menurut bapak Fadli dan ibu laini pentingnya membangun sinergi dengan pihak pemangku kepentingan, Teruma untuk mewujudkan pengembangan wisata halal. Agak sulit untuk trealisasi wisata halal tanpa adanya sinergi. Meskipun beberapa sinergi selama ini telah tercapai akan tetapi Bagaimana meningkatkan sinergi tersebut guna untuk mewujudkan dan harapan bagi semua Masyarakat dalam menciptakan wisata halal yang berkelanjutan dan berdaya saing dalam ekosistem pariwisata halal yang inklusif yang dikemas dengan kearifan lokal.

Swasta/bisnis

Dalam penelitian ini, sektor usaha diwakili oleh Leni sebagai pengusaha homestay dan Hen pemilik cafe tenda biru dan homestay.

a. Persepsi

Pelaku bisnis dan sektor swasta di Aceh Tengah termasuk pengelola hotel, homestay, café, travel, dan serta pelaku UMKM menunjukkan respon positif dan realistis terhadap konsep wisata halal. Secara umum, mereka memandang wisata halal bukan hanya sebagai tuntutan syariah, tetapi juga sebagai peluang bisnis yang sangat potensial yang dapat meningkatkan pendapatan bagi para pelaku usaha hal ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah homestay dan café yang ada di Aceh Tengah.

b. Peran dan Upaya

Pelaku bisnis atau sektor swasta memiliki peran penting sebagai penyedia layanan dan produk utama dalam ekosistem wisata halal. Peran mereka tidak hanya sebagai pelaksana operasional, tetapi juga sebagai motor inovasi dan penggerak ekonomi lokal dalam mendukung halal tourism yang inklusif. Seperti Penyedia Layanan Halal-Friendly Menyediakan layanan akomodasi, restoran, travel, spa, dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip syariah, Pendorong Inovasi Produk Wisata Mengembangkan produk wisata yang unik dan sesuai dengan prinsip halal.

c. Faktor pendukung dan hambatan

Dari sisi pelaku bisnis, pengembangan wisata halal di Aceh Tengah memiliki fondasi yang kuat, baik dari segi nilai, pasar, maupun adaptabilitas. Namun, untuk memperkuat peran sektor swasta, perlu ada dukungan teknis, insentif, pelatihan, serta kemudahan sertifikasi dari pemerintah dan lembaga terkait. Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk mengatasi hambatan dan memperkuat daya saing wisata halal secara menyeluruh.

d. Sinergi antar pemangku kepentingan

Kesesuaian budaya dan nilai lokal dengan prinsip halal masyarakat dan pelaku usaha di Aceh Tengah, maka harus melakukan sinergi dengan pihak yang terkait guna untuk memperkuat kolaborasi guna untuk mendukung kekurangan dan kelemahan yang ada guna untuk mewujudkan wisata halal yang diinginkan.

Akademisi

Penurut Fahrul Riza dosen pada IAIN Takengon sebagai informan akademik. Wawancara mendalam menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Persepsi

Pariwisata Halal sebagai Pilar Pembangunan berbasis syariah akademisi memandang bahwa pengembangan pariwisata halal sejalan dengan visi Aceh sebagai daerah yang menjalankan syariat Islam secara formal. Bagi akademisi, wisata halal merupakan: Wujud integrasi antara nilai-nilai keislaman dan pengembangan ekonomi, Instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan norma budaya dan agama.

b. Peran dan Upaya

Penyedia Landasan Konseptual dan Ilmiah akademisi memberikan dasar konseptual mengenai definisi, prinsip, dan standar pariwisata halal yang sesuai dengan konteks lokal. Mereka berkontribusi dalam merumuskan kebijakan publik yang berbasis data dan

evidence-based policy. Peneliti dan analis kebutuhan lapangan Melalui riset, akademisi mengidentifikasi: Potensi lokal (destinasi, kuliner, budaya), Kesiapan infrastruktur halal, Persepsi wisatawan Muslim, Tantangan pelaku usaha dan pemerintah. Hasil riset menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan. Pengembang kurikulum dan SDM pariwisata halal kampus menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para dunia usaha dan industri yang berkaitan dengan pariwisata halal dan pelatihan untuk menghasilkan lulusan yang paham prinsip hospitality Islami. Akademisi juga melatih pelaku UMKM dan pemandu wisata agar layanan pariwisata lebih profesional dan sesuai syariah.

c. Faktor pendukung dan hambatan

Masyarakat Gayo dan adat istiadat lokal relatif sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Akademisi menilai ini sebagai **modal sosial-kultural** yang kuat dalam mengembangkan pariwisata halal secara organik. Cintra Aceh sebagai provinsi syariah, secara nasional maupun internasional, dikenal sebagai daerah dengan penerapan syariat Islam. Hal ini menciptakan **kepercayaan awal dari wisatawan Muslim**, sehingga memudahkan promosi wisata halal. Didukung dengan produk unggulan Keindahan alam, warisan budaya Gayo, dan kopi Gayo bersertifikat halal menjadi **daya tarik wisatawan** yang ingin menikmati pengalaman Islami dalam bingkai keindahan alam. Hambatan dalam pengembangan wisata halal Ketiadaan Roadmap dan Regulasi Teknis. akademisi menyoroti belum adanya peta jalan (roadmap) atau regulasi teknis daerah yang spesifik mengatur pengembangan wisata halal, sehingga arah kebijakan cenderung sporadis.

d. Sinergi antar pemangku kepentingan

Sinergi antar pemangku kepentingan masih lemah dan bersifat sektoral, belum terbangun sistem koordinasi yang rutin dan berkelanjutan. Komunikasi antar stakeholder, terutama antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal masih minim. Belum ada forum formal lintas sektor yang khusus membahas wisata halal secara berkala (seperti forum pariwisata syariah daerah). Akademisi sering tidak dilibatkan secara strategis dalam penyusunan kebijakan daerah, padahal banyak riset dan kajian yang bisa digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan.

Komunitas

Dalam penelitian ini, Masyarakat diwakili oleh Ibu Gania. Wawancara mendalam menghasilkan beberapa hal sebagai berikut

a. Persepsi

Komunitas lokal merupakan aktor kunci dalam pengembangan pariwisata halal karena mereka berada di garis terdepan dalam menerima, melayani, dan berinteraksi langsung dengan wisatawan. Pandangan dan sikap mereka sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dari konsep halal tourism di tingkat lokal. Dukungan terhadap nilai Islam dan budaya lokal Mayoritas masyarakat Aceh Tengah, khususnya masyarakat Gayo, mendukung pengembangan pariwisata halal karena: Pariwisata halal dianggap sejalan dengan norma agama dan budaya lokal, yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Komunitas melihat wisata halal sebagai bentuk perlindungan terhadap moralitas sosial dari pengaruh negatif pariwisata konvensional. Wisata halal dinilai dapat memperkuat identitas lokal berbasis syariah dan adat Gayo. “Kami ingin wisata yang membawa berkah, bukan hanya uang. Harus sesuai dengan syariat.”

b. Peran dan Upaya

Penjaga nilai dan kearifan lokal komunitas berperan dalam memastikan bahwa layanan wisata tetap sesuai dengan norma syariah dan adat istiadat Gayo. Menjadi garda terdepan dalam menyaring bentuk pariwisata yang bertentangan dengan nilai Islam dan budaya lokal. Pelaku layanan wisata ramah muslim warga menyediakan layanan seperti: Homestay syariah dan melarang menginap yang bukan muhrimnya, kuliner halal lokal (tanpa alkohol atau bahan non halal), Pemandu wisata muslim-friendly (menjaga etika, waktu ibadah), melestarikan budaya lokal dan mempromosikan seni tradisi kearifan lokal seperti didong, saman Gayo, kerajinan tangan seperti kovenir yang dikemas dalam bentuk kerawang Gayo.

Upaya mendirikan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) berbasis syariah Pokdarwis di beberapa kampung mulai mengadopsi prinsip halal dalam aktivitas promosi dan pelayanan wisata. Menginisiasi Program pelatihan mandiri, komunitas melakukan pelatihan informal kepada warga sekitar destinasi mengenai bagaimana cara menyambut wisatawan menjaga kebersihan dan keamanan makanan halal serta bersinergi dengan pemerintah dan kampus untuk memperkuat kapasitas SDM dan pemasaran wisata halal.

c. Faktor pendukung dan hambatan

Dukungan nilai sosial dan religius bagi komunitas dan pengiat wisata halal secara umum memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai Islam, yang selaras dengan prinsip wisata halal. Kehidupan sosial masyarakat yang religius, ramah, dan menjunjung etika Islami menjadi modal utama pengembangan wisata halal. Partisipasi komunitas melalui pokdarwis kehadiran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan komunitas kreatif lokal

membantu pengelolaan destinasi wisata secara langsung, dengan hadirnya komunitas dapat mengembangkan potensi wisata halal sangat potensial ini seperti Danau lut tawar yang di apit oleh gunung yang membentang dan disuguhkan dengan perkebunan kopi.

d. Sinergi antar pemangku kepentingan

Komunitas lokal melihat bahwa pengembangan pariwisata halal tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus melibatkan kolaborasi nyata antar berbagai actor antara lain pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas itu sendiri, dan media. Namun, sinergi yang ada dinilai masih bersifat parsial dan belum optimal.

Media

a. Persepsi

Pada saat sekarang ini peran media baik cetak/elektronik mempunyai peran yang sangat strategis dan yang paling produktif dalam pemasaran wisata yang ada di Aceh Tengah, akan tetapi dalam pemasarannya bagaimana yang lebih dominan yang di promosikan wisata halal yang dibungkus dengan kearifan lokal yang mempunyai daya tarik sendiri dan menjadi pembeda diantara destinasi-destinasi wisata yang ada.

b. Peran dan Upaya

Peran media berhasil dalam mempromosikan dan memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Aceh Tengah, hal ini dapat kita lihat semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang menikmati keindahan alam yang ada di Aceh Tengah, hal ini karena begitu besar peran dan sentuhan media. Oleh karena itu baik pemerintah dan pengelola wisata dapat meningkatkan kreatifitas guna untuk meningkatkan lagi kunjungan wisatawan baik lokal maupun internasional. Kita harapkan bagaimana peran media sebagai garda terdepan tentang destinasi wisata di Aceh Tengah, seperti keindahan Alamnya, kopi Gayo, dan situs-situs budaya lokal.

c. Faktor pendukung dan hambatan

Media (cetak, elektronik, dan digital) mempromosikan destinasi wisata halal, seperti Danau Laut Tawar, kampung kopi Gayo, hingga wisata religi. Membentuk citra positif Aceh Tengah sebagai daerah yang aman, religius, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Memberikan informasi kepada pelaku wisata dan masyarakat tentang standar layanan halal, seperti penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, dan hotel syariah. Hambatan, media lokal di Aceh Tengah masih banyak yang belum mampu memproduksi konten digital berkualitas tinggi (video, vlog wisata, infografis, kampanye media sosial).

Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi digital menjadi hambatan dalam optimalisasi media sebagai alat promosi global.

d. Sinergi antar pemangku kepentingan

Sinergi antar pemangku kepentingan (stakeholder) adalah kunci utama dalam keberhasilan pengembangan pariwisata halal di Aceh Tengah. Dengan potensi budaya Gayo, kekayaan alam, dan nilai-nilai syariat Islam yang kuat, pengembangan pariwisata halal membutuhkan kerja sama lintas sektor agar dapat berkelanjutan, inklusif, dan kompetitif. Dinas Pariwisata Aceh Tengah menggandeng Kemenparekraf dan MUI untuk menyusun roadmap pengembangan wisata halal.

PENUTUP

Model ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wisata halal dengan memanfaatkan keunggulan dan peran masing-masing elemen dalam menciptakan ekosistem yang mendukung keberhasilan pengembangan wisata halal yang berkelanjutan. Pemerintah berperan dalam menyediakan kebijakan, regulasi, dan infrastruktur yang mendukung. Dengan adanya dukungan pemerintah, baik dari sisi anggaran maupun kebijakan, pengembangan wisata halal dapat berjalan dengan lancar dan terarah. Akademisi memberikan kontribusi dalam riset dan pengembangan, memberikan pengetahuan tentang pengelolaan wisata halal yang berbasis pada studi keilmuan dan kajian ilmiah. Mereka juga berperan dalam memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat setempat. Bisnis atau sektor swasta berperan dalam menyediakan investasi, fasilitas. Sektor ini juga akan berkontribusi dalam pemasaran dan penyediaan produk wisata yang memenuhi standar halal. Media berperan dalam promosi dan menyebarkan informasi mengenai wisata halal. Dengan media yang tepat, potensi wisata halal dapat dikenal luas, meningkatkan kunjungan wisatawan, dan memperkenalkan budaya lokal. Secara keseluruhan, penerapan pentahelix dalam pengembangan wisata halal memungkinkan terjalinnya sinergi antara berbagai pihak untuk menciptakan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip halal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi sektor pariwisata, tetapi juga memberikan dampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiansyah, Mahya. “Kunjungan Pariwisata Di Aceh Tengah Diklaim Meningkat.”
M. Nazir. *Metode Penelitian*, 1998.
- Rahayu, S W, and S Abbas. “A Synergy of Halal Tourism Regulations and Tourism Rights Protection in Aceh: Pentahelix Model.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan ...*, no. November (2024).
- RI, Kemenparekraf/Baparekraf. *No TitleIndonesia-Raih-Predikat-Top-Muslim-Friendly-Destination-of-the-Year-2024-Dalam-Global-Muslim-Travel-Index*. indonesia, 2024.
- Ritchie, J., Lewis, J., Nicholls, C. M., & Ormston, R. “Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers: Sage.” (2013).
- Santoso, Lukman, and Yutisa Tri Cahyani. “Pentahelix’s Collaboration In The Development of Halal Tourism For Sustainable Regional Economic Development.” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2022): 222–237.
- Sekaran, U., & Bougie, R. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (Fifth Ed.)*, 2009.
- Suherlan, Herlan, Nurdin Hidayah, and Wientor Rah Mada. “The Synergy Of Penta-Helix Stakeholders In The Development Of Smart Destination In Dieng Tourism Area, Central Java - Indonesia,” no. August (2019).
- Sunarmo, Mihda Thurisaina, Andi Amri, and Ardio Sagita. “Effects of Halal Awareness, Service Quality and Promotion on Visitor Decisions Through Destination Imagery as a Mediator.” *Indonesian Journal of Halal Research* 6, no. 1 (2024): 13–25.
- Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, 2007.
- Umiyati, Sri, and M. Husni Tamrin. “Penta Helix Synergy in Halal Tourism Development” 518, no. ICoSIHESS 2020 (2021): 75–81.